

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN
INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) JAKARTA TERHADAP
JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI**



Disusun oleh:

CHRISTINA YULITA PURBAWATI

NPM : 05 05 09248

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN
INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) JAKARTA TERHADAP
JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI**

Diajukan oleh:

CHRISTINA YULITA PURBAWATI

NPM : 05 05 09248
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 29 Januari 2010**

Dosen Pembimbing,



Anny Retnowati, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Huku /Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian

Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Febuari 2010
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru N0. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.
Sekretaris : Anny Retnowati, SH., M.Hum.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

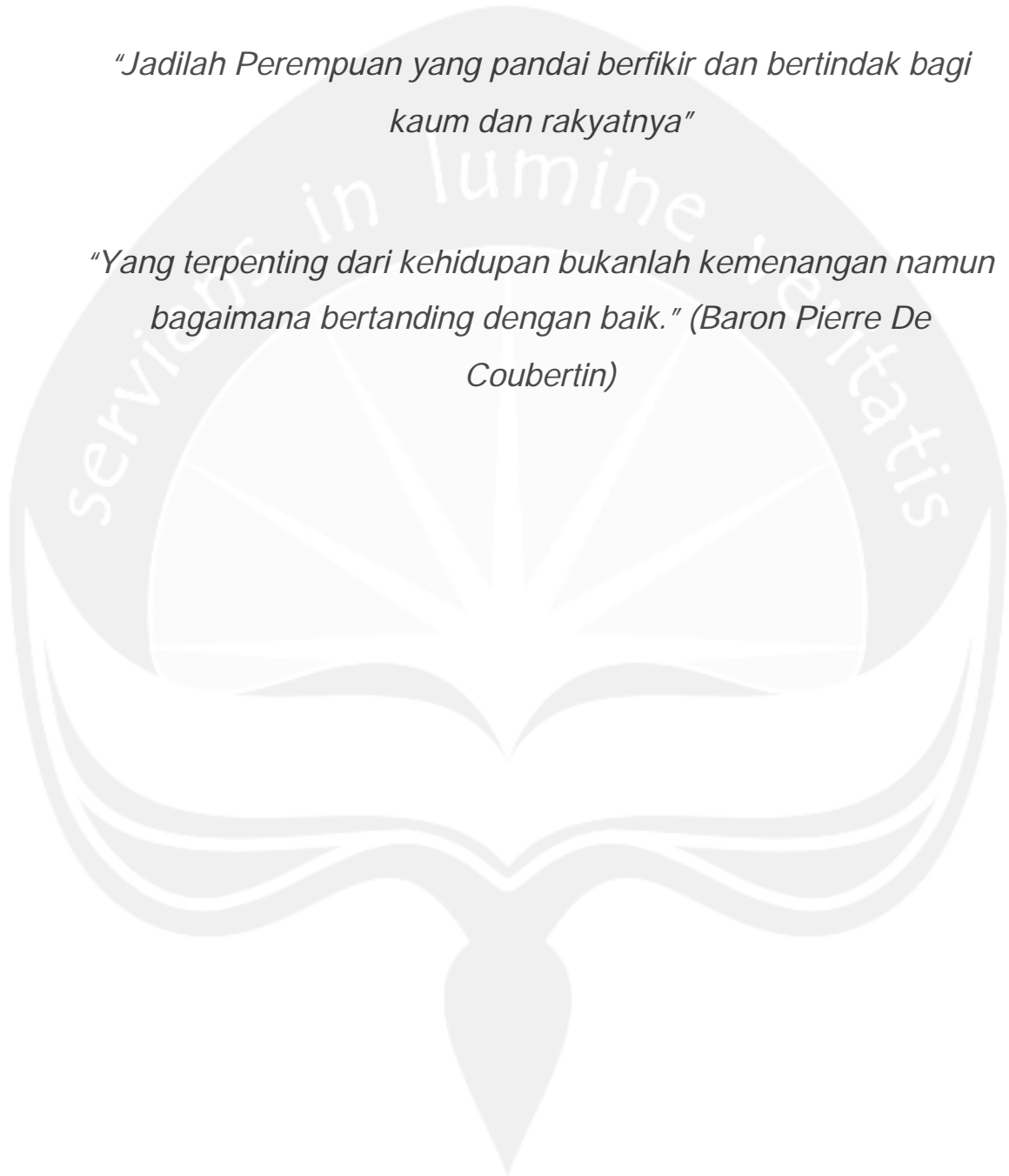


(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.)

MOTTO

“Jadilah Perempuan yang pandai berfikir dan bertindak bagi kaum dan rakyatnya”

“Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan namun bagaimana bertanding dengan baik.” (Baron Pierre De Coubertin)





***Penulisan Hukum ini
Kupersembahkan untuk:
Kaum perempuan yang sampai hari ini
masih terus berjuang untuk kesetaraan***

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dengan proses yang cukup panjang akhirnya penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Penulis bermaksud mengkaji persoalan pornografi yang masih menjadi perdebatan bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disahkan. Artinya pro kontra pornografi masih terus bergulir, tetapi kenyataannya gerak perdebatan ini dihentikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Hal ini menjadi landasan bagi sebagian elemen masyarakat untuk menolak keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Salah satunya adalah LBH APIK Jakarta yang mengajukan permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu penulis coba meneliti dan menganalisa peran LBH APIK Jakarta terhadap *judicial review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang membantu secara langsung dan tidak langsung. Tanpa bantuannya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat selesai sesuai dengan harapan dari penulis.

Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ini mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang membantu penulisan skripsi ini dan berterima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Anny Retnowati, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing skripsi. Terima atas saran dan kritiknya selama ini.
3. Saudari Umi Farida, SIP selaku Divisi Reformasi Hukum LBH APIK Jakarta.
4. Saudara M. Mahrus Ali, S.H. selaku Peneliti Mahkamah Konstitusi terkait dengan *judicial review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
5. Orang tua yang tak pernah lelah-lelahnya untuk mengerti pilihanku.
6. Adik-adikku, Vivi, Adit, Andre yang selalu ceria dan selalu memberikan motivasi agar lebih giat dalam segala hal.
7. Ganjar Krisdiyan, SE yang selalu sabar menemaniku berdiskusi tentang bumi dan persoalannya.
8. Kawan-kawan KPRM PRD, PPRM, PEMBEBASAN, Perempuan Mahardhika, SAMAN, SPK, PPBI, ARMP yang selalu konsisten berjuang untuk pembebasan perempuan dan rakyat.
9. Kawan-kawan kampus 2004, 2005.
10. Seluruh kawan yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

Sangat disadari masih banyak sekali kekurangan, maka penulis selalu menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan yang positif bagi pembaca dan masyarakat luas. Terima kasih.

Yogyakarta, 29 Januari 2010

Penyusun,

Christina Yulita Purbawati

ABSTRACT

The Role of LBH APIK in the process of judicial review of The Act Number 44 year 2008 on Pornography

Due to the pro and cons polemics around the issue of pornography, an act was brought about, i.e., the Act number 44 of 2008 on Pornography, which was seemingly served as the answer to end that ongoing polemics. This was seen to be an invalid democracy concerning the debates were not ended yet, but the draft of the act on pornography was soon ratified and immediately imposed. The rationale of debates rooted in the assumption of the existing patriarchal culture saw that this pornography act would create such a worsening societal condition of women in particular, socially and legally. This means that the implication gives the contrary result in that there will be no reassurance of legal protection for women in particular and people in general who would be more discriminated than the previous condition. This condition had become the background of some groups within society in refusing the Pornography Act by proposing an appeal for a judicial review to the Supreme Court of Constitution (MK). LBH APIK (Law Firm of Indonesian Women Association for Justice) was one of the organizations, which proposed that judicial review. It was one of organization that persuaded people not to stop criticizing the act since it was proposed as draft.

The objective of this research was to find out how far was the role of LBH APIK Jakarta in its involvement in pornography act's judicial review process. This research applied library research methodology, combined with some first-hand information through interviews in qualitative tradition. Most data were gathered from books, journals, handbook, papers, internet sources and dictionary.

This research concludes that LBH APIK proposed arguments for proposing that judicial review by testing articles stated in the act that contradicts the principals of 1945 Constitution such as: Article 1 section 1; Article 4 No 1 and 2; Article 10; Article 20; and Article 23. In addition, the implementation of the Pornography Act resulted in the increasing discriminatory acts towards women in particular. Among other examples is the absence of specific procedure of law.

Keywords: LBH APIK Jakarta's role, legal protection, equality before the law

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari 2010

Yang menyatakan,



Christina Yulita Purbawati

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Metode Analisis.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II KINERJA LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) JAKARTA DALAM *JUDICIAL REVIEW* TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

A. Tinjauan Mengenai Pornografi.....	21
1. Pengertian Pornografi.....	21
2. Klasifikasi Pornografi.....	27
3. Fakta Kondisi, Psikologi dan Budaya Perempuan dalam Pornografi Indonesia.....	30
4. Keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	33
B. Tinjauan terhadap <i>Judicial Review</i>	42
1. Sejarah <i>Judicial Review</i>	42
2. Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Permohonan pengujian Undang-Undang di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.....	46
3. <i>Judicial Review</i> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	54
C. Usulan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta pada <i>Judicial Review</i> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	60
1. Sejarah LBH APIK Jakarta.....	60
2. Tindak Lanjut Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta terhadap <i>Judicial Review</i> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	63

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	79
--------------------	----

B. SARAN.....	80
Daftar Pustaka.....	82
Peraturan Perundang-Undangan.....	85

